

REALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI KUARTAL I 2025: ANTARA TANTANGAN EKSTERNAL DAN KETAHANAN DOMESTIK

Oleh: Arie Yanwar Kapriadi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2025 tercatat sebesar 4,87% (yoy), menunjukkan capaian yang relatif solid di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Kinerja ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional, meskipun dinamika global mengalami ketidakpastian yang cukup tinggi akibat kebijakan perdagangan unilateral yang diberlakukan Amerika Serikat, serta tekanan nilai tukar dan melemahnya indikator sektor manufaktur pada awal kuartal kedua.

Dampak Ketidakpastian Global terhadap Ekonomi Domestik

Langkah Amerika Serikat dalam mengenakan tarif impor tambahan terhadap sejumlah negara mitra dagangnya telah menambah tekanan terhadap sistem perdagangan global yang selama ini saling terintegrasi. Kebijakan proteksionis semacam ini tidak hanya menimbulkan risiko perlambatan perdagangan internasional, namun juga memperkuat tekanan terhadap pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kondisi tersebut turut memengaruhi nilai tukar rupiah yang terdepresiasi cukup signifikan pada April 2025, mencapai Rp16.820 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini mencerminkan sentimen investor yang berhati-hati di tengah ketidakpastian global, serta arus modal keluar yang meningkat dari negara-negara berkembang menuju aset-aset aman (safe haven). Dampak depresiasi nilai tukar berpotensi meningkatkan tekanan pada harga barang impor, biaya produksi industri, dan beban pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Tekanan dan Harapan Pada Sektor Manufaktur dan Investasi

Di tengah tantangan global, sektor manufaktur nasional masih mencatatkan pertumbuhan tahunan yang cukup baik. Pada triwulan I 2025, sektor ini tumbuh sebesar 4,55% (yoy), meningkat dari pertumbuhan 4,13% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini

menunjukkan bahwa permintaan domestik, peningkatan kapasitas produksi, serta realisasi investasi industri turut mendukung kinerja manufaktur nasional.

Namun demikian, indikator jangka pendek menunjukkan adanya tekanan yang tidak dapat diabaikan. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April 2025 turun tajam ke level 46,7 dari 52,4 pada Maret 2025. Penurunan ini mencerminkan kontraksi aktivitas industri pengolahan, yang didorong oleh melemahnya permintaan global dan meningkatnya ketidakpastian pasar ekspor. Jika berlanjut, kondisi ini dapat menekan kinerja industri dalam jangka pendek, yang pada gilirannya akan mempengaruhi capaian pertumbuhan dan penerimaan negara.

Di sisi lain, tren positif realisasi investasi menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi pada triwulan I 2025 mencapai Rp465,2 triliun, tumbuh 2,7% dibandingkan triwulan IV 2024 dan meningkat signifikan sebesar 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini mencerminkan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, serta keberlanjutan reformasi struktural dan iklim usaha yang semakin kondusif.

Pertumbuhan investasi ini penting dalam menjaga momentum ekonomi, mengingat kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan perluasan basis penerimaan negara, baik dari sisi pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Implikasi yang Perlu di Waspadai Terhadap Pelaksanaan APBN

Tekanan eksternal, perlambatan aktivitas manufaktur, serta depresiasi nilai tukar memiliki potensi dampak terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan. Dari sisi penerimaan negara, penurunan ekspor dan pelemahan aktivitas industri berpotensi menekan penerimaan pajak, khususnya

dari sektor industri pengolahan, perdagangan, dan bea keluar. Selain itu, depresiasi nilai tukar juga dapat meningkatkan kewajiban pembayaran bunga utang luar negeri dan subsidi energi apabila harga minyak global mengalami kenaikan.

Namun, pertumbuhan investasi dan konsumsi domestik yang relatif terjaga menjadi sumber harapan untuk tetap menopang penerimaan pajak dalam negeri. Pemerintah perlu memastikan efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak.

Di sisi belanja negara, ketidakpastian global menuntut adanya fleksibilitas dan ketepatan dalam pelaksanaan anggaran. Pemerintah perlu menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, mendukung dunia usaha, serta memperkuat stimulus fiskal yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas sektor riil. Dalam jangka pendek, respons kebijakan fiskal yang antisipatif dan terkoordinasi dengan kebijakan moneter akan sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% pada triwulan I 2025 mencerminkan daya tahan ekonomi domestik dalam menghadapi ketidakpastian global. Kinerja sektor manufaktur secara tahunan dan tren investasi yang meningkat memberikan fondasi penting bagi kesinambungan pertumbuhan. Meski demikian, tekanan eksternal, depresiasi rupiah, dan kontraksi PMI menjadi pengingat penting bahwa risiko ke depan tetap perlu diantisipasi dengan cermat.

Peran APBN sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi tetap sangat sentral. Oleh karena itu, pengelolaan fiskal yang prudent, responsif, dan adaptif harus terus menjadi prioritas dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional serta menghadirkan perlindungan bagi masyarakat di tengah gejolak global yang dinamis.

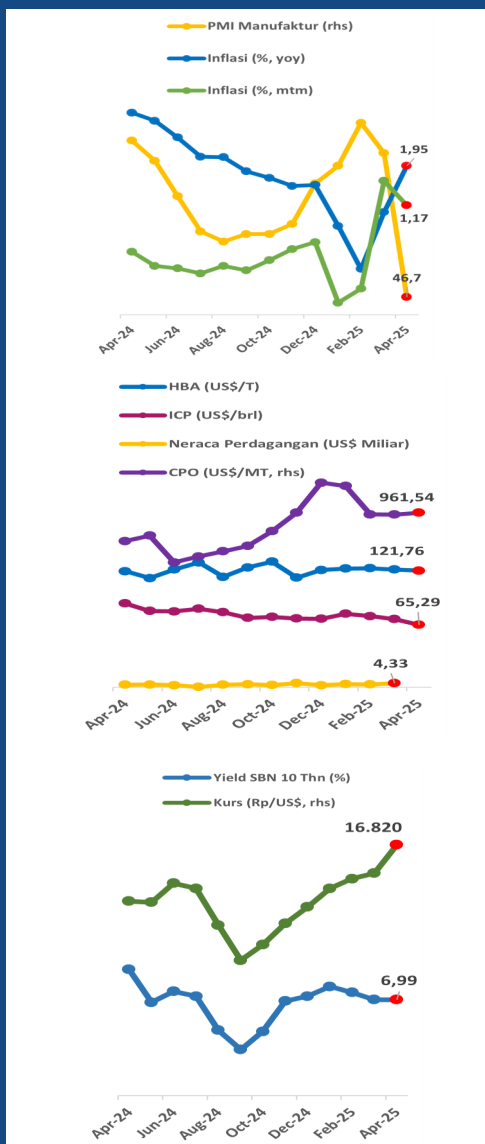
REALISASI APBN

s.d. 30 April 2025

Realisasi APBN s.d. 30 April 2025

Pendapatan Negara	Rp810,5 T (27,0% target)	Belanja Negara	Rp806,2 T (22,3% pagu)	Pembiayaan Anggaran	Rp279,2 T (45,3% target)
<i>Antara lain:</i>					
Penerimaan Pajak	Rp557,1 T (25,4% target)	Belanja K/L	Rp253,6 T (21,9% pagu)	Pembiayaan Utang	Rp304,1 T (39,2% target)
Kepabeanaan dan Cukai	Rp100,0 T (33,1% target)	Belanja non-K/L	Rp293,1 T (19,0% pagu)	Pembiayaan Investasi	Rp(26,6) T (17,2% alokasi)
PNBP	Rp153,3 T (29,8% target)	Transfer ke Daerah	Rp259,4 T (28,2% alokasi)		
Surplus APBN		Rp4,3 T 0,02% PDB	Surplus Keseimbangan Primer		Rp173,9 T

LEADING INDICATORS YANG BERPENGARUH TERHADAP POSTUR APBN



Sektor Riil

Inflasi tahunan pada April 2025 tercatat sebesar 1,95% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 1,03%, sementara secara bulanan (mtm) inflasi mencapai 1,17%. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh inflasi komponen inti seiring melonjaknya harga emas dunia. Di sisi lain, PMI Manufaktur anjlok ke 46,7 dari 52,4 pada Maret, menandakan kontraksi terdalam sejak Agustus 2021. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya permintaan baru, baik domestik maupun ekspor, serta tekanan dari perang tarif yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku impor.

Sektor Eksternal

Indonesia pada April 2025 mencerminkan dinamika beragam. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) turun tajam ke US\$65,29/barel, dipicu oleh kenaikan produksi negara OPEC+ pada April 2025 serta imbas tarif Trump yang menekan permintaan komoditas global. Harga Batubara Acuan (HBA) juga sedikit terkoreksi menjadi US\$121,76/ton, seiring normalisasi permintaan pasca musim dingin. Sebaliknya, harga CPO menguat ke US\$961,54/MT, didorong oleh berlanjutnya permintaan global untuk biodiesel dan terbatasnya pasokan akibat curah hujan tinggi di kawasan produsen. Sementara itu, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar US\$4,33 miliar pada Maret 2025, mencerminkan ketahanan ekspor nonmigas di tengah tekanan global.

Sektor Keuangan

Pada April 2025 Sektor Keuangan Domestik masih mengalami tekanan. Nilai tukar rupiah melemah ke Rp16.820 per dolar AS, menjadi yang terendah dalam sejarah, didorong oleh penguatan indeks dolar AS dan arus keluar modal seiring eskalasi perang dagang AS-Tiongkok setelah Presiden Trump memberlakukan tarif resiprokal barang impor terhadap berbagai negara. Yield SBN 10 tahun tetap tertahan di 6,99%. Kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, termasuk mempertahankan suku bunga acuan, membantu menahan imbal hasil obligasi domestik dan menjaga kepercayaan investor meskipun menghadapi tekanan eksternal.

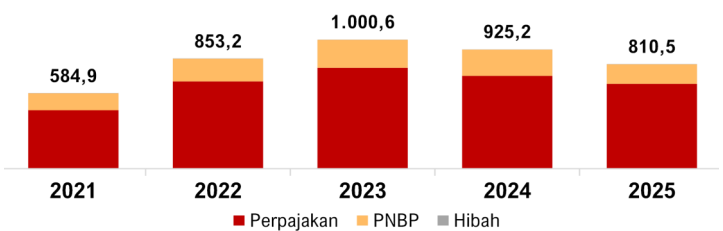
PENDAPATAN NEGARA

KINERJA PENDAPATAN NEGARA MENCAPAI 10,5% DARI TARGET APBN 2025

Realisasi pendapatan negara sampai dengan April 2025 mencapai Rp 810,5 triliun atau 27,0% terhadap target APBN 2025. **Kinerja penerimaan perpajakan mencapai Rp657,0 triliun atau 26,4% dari target APBN 2025.** Dari sisi komponen, kinerja penerimaan pajak sampai dengan April 2025 mencapai Rp557,1 triliun atau 25,4% dari APBN 2025. Secara bulanan, kinerja pajak melanjutkan pertumbuhan, dimana bulan April 2025 mengalami pertumbuhan 8,8% (MoM), melanjutkan pertumbuhan bulan Maret sebesar 6,7% (MoM). Secara akumulatif, penerimaan pajak dipengaruhi dampak pemberlakuan tarif efektif rata-rata yang mempengaruhi penerimaan pajak di awal tahun serta peningkatan restitusi PPh Badan dan PPN.

Sementara itu, **kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mampu mencapai Rp100,0 triliun.** Kinerja tersebut dipengaruhi oleh (1) penurunan tarif efektif rata-rata akibat penurunan BM komoditas utama serta peningkatan utilitas FTA, (2) kenaikan CPO dan kebijakan relaksasi ekspor tembaga, serta (3) penurunan produksi November 2024 sampai dengan Februari 2025.

Pendapatan Negara (Rp T)



KINERJA PNBP S.D 30 APRIL 2025 DIDUKUNG OLEH PENDAPATAN SDA, DAN PNBP K/L

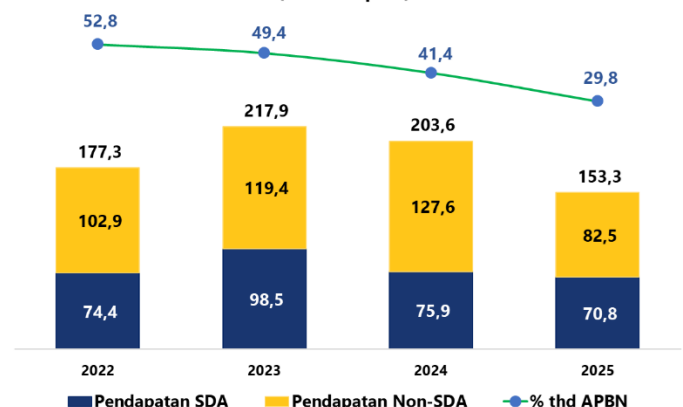
Realisasi PNBP sampai dengan 30 April 2025 mencapai Rp153,3 triliun (29,8% dari APBN 2025). Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA) yang menyumbang 46,2% dari total realisasi PNBP s.d 30 April 2025. Sementara itu, capaian tertinggi diperoleh dari PNBP K/L yang mencapai 45,2% dari target APBN 2025.

Realisasi Pendapatan SDA Migas mencapai Rp34,0 triliun (28,1% dari APBN 2025). Realisasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan ICP dampak kekhawatiran terhadap tarif perdagangan AS, sinyal OPEC+ menaikkan produksi minyak, serta peningkatan stok minyak mentah AS. Pada periode Maret 2025, rata-rata *lifting* minyak bumi sebesar 579,1 ribu barel/hari (2024: 567,2 ribu barel/hari) dan rata-rata *lifting* gas bumi mencapai sebesar 954,7 ribu barel/hari (2024: 884,2 ribu barel/hari). Sementara itu, rata-rata ICP periode April 2025 sebesar US\$71,9/barel (2024: US\$82,2/barel).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp36,7 triliun (37,9% dari APBN 2025). Realisasi tersebut utamanya didorong oleh pendapatan SDA pertambangan mineral sebesar Rp34,3 triliun (39,3% dari APBN 2025) terutama berasal dari penerimaan royalti batubara yang dipengaruhi oleh moderasi HBA serta penurunan produksi batubara. Realisasi pendapatan SDA kehutanan mencapai sebesar Rp1,8 triliun (31,7% dari APBN 2025) terutama disumbang dari pembayaran Dana Reboisasi (DR) & Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), salah satunya pembayaran tagihan atas kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah terbangun di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan. Realisasi pendapatan SDA kelautan dan perikanan mencapai sebesar Rp0,3 triliun (16,1% dari APBN 2025) berasal dari Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan. Selanjutnya, realisasi pendapatan SDA panas bumi telah mencapai sebesar Rp0,3 triliun (14,6% dari APBN 2025) meskipun terdapat peningkatan biaya yang signifikan di seluruh WKP milik PGE (Pertamina Geothermal Energy Tbk).

Realisasi Pendapatan KND mencapai sebesar Rp10,9 triliun (12,1% dari APBN 2025). Realisasi Pendapatan KND berasal dari pembayaran dividen Perbankan, yaitu dividen interim BRI tahun buku 2024. Sampai dengan 30 April 2025, tidak terdapat tambahan setoran Pendapatan KND seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur pengalihan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara.

Realisasi PNBP s.d 30 April, 2022-2025 (triliun rupiah)



Realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp48,0 triliun (37,6% dari APBN 2025). Realisasi tersebut utamanya disumbang oleh PNBP KL sebesar Rp38,9 triliun (45,2% dari APBN 2025) yang terbesar berasal dari pendapatan BUN atas pendapatan pengelolaan rekening negara dan pendapatan jasa komunikasi dan informatika. Kinerja PNBP lainnya ini juga disumbang oleh Pendapatan Penjualan Hasil Tambang yang terealisasi sebesar Rp9,2 triliun (24,6% dari APBN 2025) dipengaruhi oleh moderasi HBA. Sementara itu, Pendapatan *Domestic Market Obligation* (DMO) s.d 30 April 2025 belum mencatatkan penerimaan.

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp23,6 triliun (30,3% dari APBN 2025). Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan BLU Sawit sebesar Rp4,9 triliun (37,3% dari APBN 2025), yang dipengaruhi oleh perubahan tarif Pungutan Ekspor (PE) untuk CPO dan turunannya, serta Pendapatan BLU Nonsawit sebesar Rp18,7 triliun (28,9% dari APBN 2025) dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan jasa layanan rumah sakit dan pendapatan jasa layanan pendidikan.

HIBAH

Penerimaan hibah mencapai Rp0,2 triliun, dipengaruhi baik dari penerimaan hibah dalam negeri maupun hibah luar negeri. Hibah dalam negeri terutama dari pemerintah daerah, sedangkan hibah luar negeri terutama dari skema terencana multilateral.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara sampai dengan April Tahun 2025 mencapai Rp806,2 T (22,3% dari APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 T), terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp546,8 T (20,2% dari APBN 2025) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp259,4 T (28,2% dari APBN 2025 Rp919,9 T).

BPP SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2025 DIMANFAATKAN UTAMANYA UNTUK PENYALURAN PROGRAM BANSOS, PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN/TNI/POLRI, PENYALURAN BOS (KEMENAG), DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp546,8 T tersebut terdiri dari realisasi Belanja K/L dan Belanja Non-K/L. Realisasi Belanja K/L mencapai Rp253,6 T (21,9% dari APBN 2025) dan dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako, bantuan iuran PBI JKN, serta pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri. Selanjutnya, **Realisasi Belanja Non-K/L** mencapai Rp293,1 T (19,0% dari APBN 2025) serta dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.

Adapun penjelasan kinerja Belanja K/L sampai dengan April 2025 berdasarkan jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

Realisasi Belanja Pegawai K/L mencapai Rp102,0 T (33,3% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp66,4 T dan komponen tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp35,6 T. Realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan pendidik non PNS pada Kemendikdasmen dan Kemendiksanstek.

Realisasi Belanja Barang K/L mencapai Rp71,4 T (14,7% dari APBN 2025). Penurunan belanja barang antara lain disebabkan oleh penyaluran BOS dan persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang cukup besar. Secara rinci realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pelayanan K/L kepada masyarakat antara lain penyaluran BOS, operasional dan layanan K/L, pelayanan keamanan lalu lintas, biaya distribusi bantuan, dan pemberdayaan masyarakat desa tertinggal; (2) pemeliharaan aset negara antara lain pemeliharaan sarpras dan BMN, harwat alutsista /nonalutsista, dan harwat sistem IT; (3) layanan masyarakat melalui BLU antara lain Subsidi Bio Diesel, pelayanan kesehatan masyarakat, dan penyaluran LPDP; serta (4) barang diserahkan Ke masyarakat/Pemda antara lain penyaluran MBG, infrastruktur EBT dan konservasi energi; serta preservasi jalan dan jembatan.

Realisasi Belanja Modal K/L mencapai Rp36,6 T (15,7% dari pagu APBN 2025), yang dipengaruhi antara lain antara lain oleh pengadaan peralatan dan mesin. Kinerja realisasi Belanja Modal dimanfaatkan antara lain untuk: (1) modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana bidang pendidikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) pengadaan almatsus oleh Polri; (3) pengadaan sarpras pada Kejaksaan; (4) pengembangan bendungan dan danau, pengendalian banjir/drainase, jaringan irigasi, jalan, dan jembatan oleh

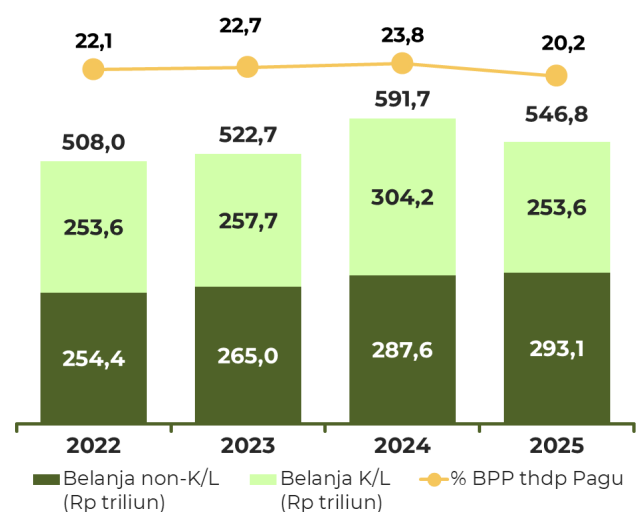
Kementerian PU, serta (5) prasarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi oleh Kementerian Agama.

Realisasi Bantuan Sosial K/L mencapai Rp43,6 T atau 32,3% dari pagu APBN 2025. Sampai dengan akhir April 2025, realisasi belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta KPM, (2) penyaluran bantuan kartu sembako bagi 18,3 juta KPM, (3) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) penyaluran bantuan PIP bagi 2,9 juta siswa dan bantuan KIP Kuliah bagi 798,2 ribu mahasiswa; (5) pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dan bantuan permakanaan bagi yatim piatu, lansia dan penyandang disabilitas serta penanganan korban bencana.

Realisasi Belanja Non-K/L sampai dengan April Tahun 2025 utamanya dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi. Realisasi pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp70,8 T (40,9% dari APBN 2025). Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp169,6 T (30,7% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp47,4 T (15,4% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Subsidi terdiri atas: (1) Subsidi Energi sebesar Rp47,0 T, untuk penyaluran BBM bersubsidi sebesar 4,3 juta KL, LPG Tabung 3 Kg sebesar 2,1 juta MT, dan listrik bersubsidi untuk 42,0 juta pelanggan; dan (2) Subsidi Non-Energi sebesar Rp379,3 M, dengan manfaat penyaluran untuk Subsidi Bunga KUR kepada 1,5 juta debitur dan plafon penyaluran KUR sebesar Rp86,4 T, serta penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 2,3 juta ton. Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp628,5 M (0,1% dari APBN 2025), antara lain dimanfaatkan untuk operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (SKK Migas dan Kawasan Bintang Karimun) serta bantuan kemasyarakatan presiden dan wakil presiden.

Realisasi BPP s.d. 30 April 2022-2025

(triliun rupiah)



BELANJA PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH

REALISASI TRANSFER KE DAERAH (TKD) S.D. 30 APRIL 2025 UTAMANYA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK DI DAERAH, ANTARA LAIN DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Realisasi penyaluran TKD s.d. 30 april 2025 mencapai Rp259,4 T (28,2% terhadap APBN 2025), menunjukkan peningkatan sebesar 0,7% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dalam memenuhi persyaratan penyaluran TKD.

Realisasi Penyaluran TKD s.d. 30 April, 2022-2025 (triliun rupiah)



Penyaluran DBH s.d. 30 april 2025 telah terealisasi sebesar Rp36,2 T (18,8% terhadap APBN 2025). Realisasi DBH tersebut terdiri dari DBH Pajak Rp15,7 T dan DBH SDA Rp20,5 T, sedangkan DBH Perkebunan Sawit belum terdapat realisasi penyaluran. Penggunaan DBH pada tahun 2025 diarahkan antara lain untuk mendukung kebijakan DBH *earmarked* bagi sektor-sektor prioritas yang didesain lebih luas dan fleksibel sesuai peraturan perundang-undangan.

Realisasi penyaluran DAU s.d. 30 april 2025 mencapai Rp153,3 T (34,3% terhadap APBN 2025), lebih tinggi sebesar 3,9% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran DAU *Block Grant* sebesar Rp148,6 T yang utamanya digunakan untuk pembayaran gaji ASN Daerah dan DAU *Specific Grant* sebesar Rp4,7 T untuk bidang pendidikan, kesehatan, pendanaan kelurahan. Sementara itu, dukungan DAU *Specific Grant* untuk penggajian formasi PPPK yang diangkat pada tahun 2025 belum terdapat realisasi penyaluran.

Realisasi penyaluran DAK s.d. 30 april 2025 sebesar Rp44,6 T (24,1% terhadap APBN 2025), lebih tinggi 7,8% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Realisasi tersebut sebagian besar berasal dari penyaluran DAK Nonfisik (a.l. Dana BOS sebesar Rp26,0 T, Dana BOP PAUD sebesar Rp2,0 T, Dana TPG ASND sebesar Rp11,0 T, serta Dana BOK dan BOKB sebesar Rp4,2 T). Sementara itu, DAK Fisik telah terealisasi sebesar Rp35,7 M dan Hibah kepada Daerah belum terdapat realisasi penyaluran.

Dana Otsus Aceh dan Provinsi-provinsi di wilayah Papua tahun 2025 diarahkan untuk penurunan kemiskinan, perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta mendukung capaian rencana induk percepatan pembangunan Papua untuk mewujudkan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Selanjutnya, sama dengan periode tahun sebelumnya, s.d. 30 april 2025 belum terdapat realisasi penyaluran Dana Otsus.

Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta pada tahun 2025 diarahkan untuk: (1) penurunan tingkat kemiskinan; (2) pemberdayaan masyarakat dan UMKM; dan (3) peningkatan penyediaan layanan dasar publik daerah. Selanjutnya, s.d. 30 april 2025 realisasi penyaluran Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta mencapai Rp150,0 M (12,5% terhadap APBN 2025).

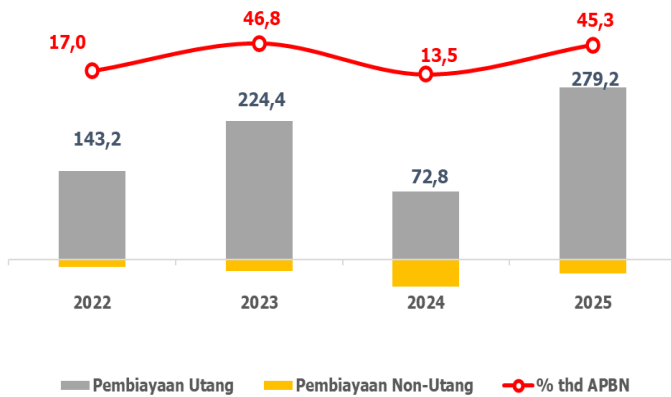
Dana Desa pada tahun 2025 difokuskan antara lain untuk: (1) penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi sebesar 15% dari pagu yang diterima setiap desa; (2) penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk *stunting*; (3) dukungan program ketahanan pangan; dan (4) operasional pemerintah desa paling tinggi sebesar 3% dari pagu yang diterima setiap desa. Realisasi penyaluran Dana Desa s.d. 30 april 2025 mencapai Rp24,5 T (34,5% terhadap APBN 2025). Realisasi Dana Desa tersebut termasuk penyaluran BLT Desa sebesar Rp1,4 T yang ditujukan bagi sekitar 4,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa.

Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Fiskal kepada daerah dengan tujuan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola APBD dan meningkatkan kemandirian daerah. Realisasi Dana Insentif Fiskal s.d. 30 april 2025 sebesar Rp0,7 T (11,4% terhadap APBN 2025), lebih tinggi sebesar 44,4% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024.

PEMBIAYAAN

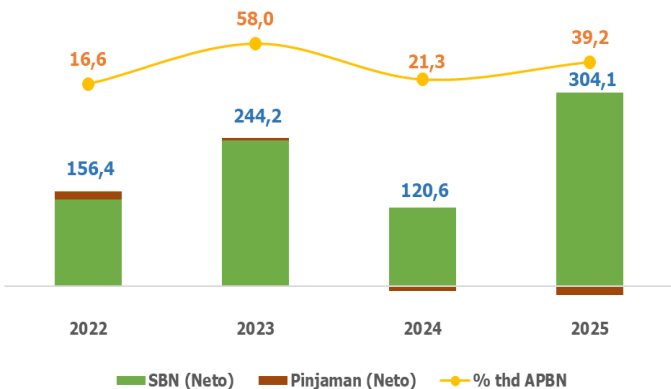
Pembiayaan anggaran sampai dengan Bulan April 2025 terealisasi sebesar Rp279,2 T atau 45,3% dari APBN 2025. Realisasi ini disumbang dari realisasi pembiayaan utang dan realisasi pembiayaan non-utang.

Realisasi Pembiayaan Anggaran s.d 30 April, 2022-2025
(triliun Rupiah)



Pada pos pembiayaan utang, sampai dengan Bulan April 2025 secara neto terealisasi sebesar Rp304,1 T atau 39,2% dari APBN 2025. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari realisasi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp319,0 T dan realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp14,9 T. Tanda negatif pinjaman (neto) menunjukkan bahwa pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar daripada penarikan pinjaman.

Realisasi Pembiayaan Utang s.d 30 April, 2022-2025
(triliun Rupiah)



Selanjutnya, terkait dengan realisasi pinjaman (neto) dimaksud, terdiri dari realisasi Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (neto) sebesar negatif Rp1,8 T dan realisasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) (neto) sebesar negatif Rp13,1 T.

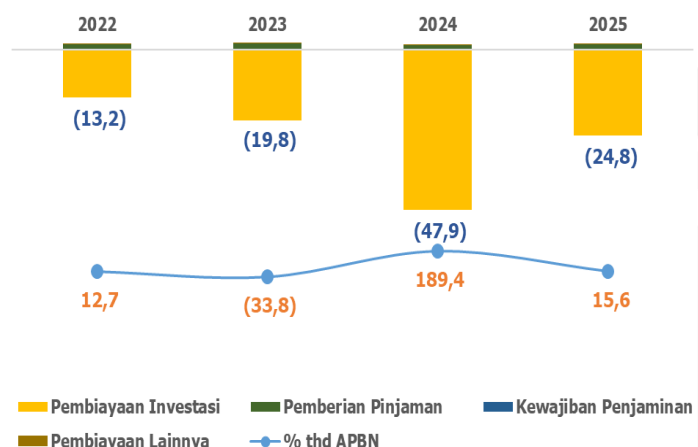
Sementara itu, dari pos pembiayaan non-utang, realisasi sampai dengan Bulan April 2025 sebesar negatif Rp24,8 T atau 15,6% dari APBN 2025, terdiri dari realisasi pembiayaan investasi sebesar negatif Rp26,6 T, realisasi pemberian pinjaman sebesar Rp1,5 T, dan realisasi pembiayaan lainnya sebesar Rp0,2 T.

Realisasi pembiayaan investasi sebesar negatif Rp26,6 T tersebut berasal dari penerimaan kembali investasi berupa penerimaan pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah sebesar Rp1,3 T dan dan penerimaan pembiayaan investasi Pemerintah non-permanen sebesar Rp0,2 T, investasi pemerintah oleh BUN (non-permanen) sebesar negatif Rp28,1 T yang terdiri dari investasi pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar negatif Rp11,5 T dan investasi pada OIP Perum BULOG sebesar negatif Rp16,6 T untuk program penyerapan 3 juta ton beras/ setara beras.

Sampai dengan Bulan April 2025, pemberian pinjaman telah terealisasi (neto) sebesar Rp1,5 T. Realisasi tersebut berasal dari realisasi pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) sebesar negatif Rp0,4 T, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar Rp1,8 T, serta penerimaan cicilan pengembalian dana antisipasi untuk pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo sebesar Rp0,1 T.

Selanjutnya, pos pembiayaan lainnya telah terealisasi sebesar Rp0,2 T yang berasal dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA). HPA merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks bank dalam likuidasi (BDL).

Realisasi Pembiayaan Non-Utang s.d 30 April, 2022-2025
(triliun Rupiah)



EVENT APBN**DISKUSI TINGKATKAN KAPASITAS ANALISIS DATA MELALUI PELATIHAN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP (LSEG) WORKSPACE**

Penyelenggara	:	Direktorat Jenderal Anggaran dan LSEG Workspace
Waktu dan Tempat	:	Menara Astra, Jakarta
Narasumber	:	Gabriela Sutisna, Ahli dari LSEG Workspace
Peserta	:	Para Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran

Jakarta, 22 April 2025 – Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyelenggarakan pelatihan “LSEG Workspace” pada Selasa, 22 April 2025 di Menara Astra, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam mengakses dan menganalisis data guna mendukung pengambilan keputusan APBN yang lebih berbasis data.

Pelatihan diikuti oleh pejabat dan pegawai DJA yang telah ditugaskan secara resmi. LSEG Workspace merupakan platform terbaru yang dikembangkan oleh Refinitiv (bagian dari London Stock Exchange Group), menggantikan Refinitiv Eikon yang dihentikan mulai 31 Januari 2025.

Dengan antarmuka yang lebih fleksibel dan personal, LSEG Workspace memberikan akses luas terhadap data keuangan, berita, analisis, dan alat produktivitas yang dapat digunakan dari desktop, web, maupun perangkat mobile. Platform ini dirancang untuk mendukung beragam peran profesional keuangan, termasuk analis, manajer portofolio, dan pengembang.

Melalui pelatihan ini, DJA berharap para pegawai mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru, memperkuat proses analisis fiskal, dan mempercepat penyajian data strategis kepada pimpinan.

**REDAKSI****Direktorat Penyusunan APBN**

Gedung Sutikno Slamet

Jl. DR Wahidin No. 1

Jakarta Pusat

Telp: (021) 3849315

Email: penyusunan.apbn@gmail.com

Ditandatangani secara elektronik

PRUDENT*Profesional, Responsif, Unggul, Dedikatif, Efisien, No Korupsi, Transparan*